



Organisasi dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah

Ridwan Wijayanto Said^{1*}, Andhika Saputra¹, Faria Ruhana¹

¹ Pasca Sarjana Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

*Corresponding author email: mtsp.40.3496@ipdn.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2024
Approved June 15, 2024

Keywords:

Organization, Government
Management, Strategic
Functions

ABSTRACT

Organization and government management are two things that are interconnected in facilitating government governance. To achieve all the forms that are aspired to in the implementation of government, government management is the main factor, including the organization and available resources. In achieving the goals it wishes to achieve, the government also requires accountability and transparency which functions as supervision in government governance. So, to ensure that accountability is implemented, a good management system is needed. The research specifications used in this paper are descriptive-analytical. Descriptive-analytical. So this research shows that government functions consist of service, empowerment and development functions. Meanwhile, the functions of management itself include planning, organizing, directing and controlling.

ABSTRAK

Organisasi dan manajemen pemerintah merupakan dua hal yang saling keterkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Untuk mencapai segala bentuk yang dicita-citakan dalam terselenggaranya pemerintahan, manajemen pemerintah adalah faktor utama, termasuk didalamnya organisasi dan sumber daya yang tersedia. Dalam mencapai tujuan yang hendak di capainya, pemerintah juga memerlukan adanya akuntabilitas serta transparansi yang berfungsi sebagai pengawasan dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk menjamin terlaksanakannya akuntabilitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang baik. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis. Sehingga dari penelitian ini menghasilkan bahwa Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Sedangkan fungsi dari manajemen sendiri antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.



How to cite: Said, R. W., Saputra, A., & Ruhana, F. (2024). Organisasi dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1391–1399. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2832>

PENDAHULUAN

Organisasi dan manajemen pemerintah merupakan wadah dalam pelaksanaan proses kegiatan tatakelola pemerintahan. Sehingga dengan adanya tatakelola tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik maka akan mencerminkan elit politik yang memiliki pemahaman akan kemampuannya dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi sebagaimana mestinya.

Pemerintah dalam bentuk kata kerjanya berasal dari kata lain *gubernare* atau yang dalam bahasa Yunani *kybernan* yang memiliki arti mengemudikan. Dalam bahas Inggris diartikan sebagai *govern* yang berarti memerintah. Sehingga memerintah disini bisa diartikan mengemudikan. Kecenderungan untuk mengembalikan makna pemerintahan dari *government* ke *governance* menghidupkan *governance* di samping dari *government* itu sendiri (Siregar, 2020).

Untuk menjalankan rodanya antara organisasi dan manajemen dalam pemerintahan keduanya memiliki kaitan yang berhubungan satu sama lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain, dalam melaksanakan sistem administrasinya, seorang administrator dibantu oleh orang-orang yang bekerjasama dalam menjalankan tugasnya sehingga harus dipadukan agar mengarah pada tujuan yang hendak dicapai demikian. Kerjasama setiap orang dalam rangka mencapai tujuannya tersebut perlu di susun dan diatur yang mana tentunya membutuhkan adanya organisasi yang mewadahnya. Oleh karena dalam administrasi yang dihadapkan adalah orang yang bekerjasama dengan akal dan perasaannya maka dengan demikian dalam hal menggunakan alat-alat dan materi lainnya sehingga setiap orang tersebut memerlukan adanya penggerak menuju sasaran yang akan dicapai yaitu dalam hal ini merupakan bagian daripada fungsi manajemen (Goraph, 2020). Sumber Daya Manusia juga memiliki peranan penting sebagai penentu keberhasilan dalam memberikan nilai tambah bagi keunggulan kompetitif organisasi (Rifai et al., 2021).

Menurut pendapat Guru Besar dan Pakar Ilmu Administrasi Negara Universitas Laiden Belanda, A. Van Braam menyatakan bahwa “suatu pemerintah akan menjalankan hakikatnya pemerintah jika pemerintah itu memandang kepentingan-kepentingan para warga negaranya dalam jangka panjang, dan dengan demikian menciptakan kerangka hukum, ketertiban dan keamanan, dimana warga negara diberikan peluang untuk mengatur hidupnya dalam kebebasan yang hanya dibatasi kebebasan orang-orang lain dan oleh berbagai undang-undang yang mengamankan kebiasaan itu (Budi, 2009).

Dalam mencapai tujuan yang hendak di capainya, pemerintah juga memerlukan adanya akuntabilitas serta transparansi yang berfungsi sebagai pengawasan dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk menjamin terlaksanakannya akuntabilitas tersebut maka diperlukan adanya sistem manajemen yang baik (Jitmau et al., 2017).

Secara umumnya fungsi dari sistem organisasi pemerintahan mencakup beberapa hal yaitu, *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (pemberian motivasi) dan *controlling* (pengendalian). Keempat poin utama tersebut merupakan hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga dari uraian tersebut diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Organisasi Dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan”.

METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis menurut Soerjono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, hal ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, 2015). Spesifikasi ini pun dirasa tepat untuk digunakan karena para peneliti menyajikan hakikat hubungan antara para peneliti dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki arti menyeluruh melakukan sesuatu sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan suatu bentuk kekuasaan yang memerintah suatu negara (Syarifin, 2005). Sedangkan secara terminology pemerintah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang secara terus menerus atau merupakan suatu bentuk kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal dan tata cara tertentu untuk tercapainya tujuan tertentu yang hendak dicapai (Utrecht, 1963).

Setiap lembaga pemerintahan tentunya menginginkan memiliki sistem pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance*. Sehingga agar *good governance* dapat terwujud dan berjalan sesuai yang diharapkan maka membutuhkan adanya suatu komitmen dan ketertiban dalam menjalankannya (Astomo et al., 2014).

Manajemen adalah proses dimana kita memulai untuk mengkoordinasi sesuatu. Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan, bagaimana kita menyeimbangkan tujuan- tujuan yang sekiranya bertentangan, dengan manajemen pula, bagaimana kita membuat pekerjaan menjadi efektif dan tentunya efisien (Hamid, 2020).

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Ada wadah pengetahuan tentang manajemen yang terorganisir, ada ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa manajemen dapat dibuktikan kebenarannya secara umum. Seni merupakan pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemahiran timbul melalui pengalaman, pengamatan dan studi, serta kewajiban untuk menerapkan pengetahuan manajemen. Seni manajemen menuntut adanya kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu manajemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi. Jika salah satu meningkat, maka yang lain juga harus meningkat, dibutuhkan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut. Manajemen sudah sama tuanya dengan peradaban manusia (Terry, 2009).

Untuk mencapai segala bentuk yang dicita-citakan dalam terselenggaranya pemerintahan, manajemen pemerintah adalah faktor utama, termasuk didalamnya organisasi dan sumber daya yang tersedia. Manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya.

Salah satu pendapat yang berhubungan dengan peran pemerintah di antaranya dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa peran pemerintah terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri.

Menurutnya, peran serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal, antara lain filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi semacam itu. Hal tersebut berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya). Mengenai cara pelaksanaan peran pemerintah tersebut, Awaludin Djamin mengungkapkan bahwa terdapat klasifikasi cara pelaksanaannya, yaitu:

1. Fungsi pengaturan yang terbagi kedalam penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan dan pengawasan;
2. Pemilikan sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh swasta.

Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang mengatur kepentingan itu. Pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik.

Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti *empowering* dan dalam arti *enabling*. Dalam arti *empowering*, pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti *enabling*, pemberdayaan, yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.

Sedangkan fungsi pembangunan (*development*), Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum mampu membangun diri sendiri. Konsep *development* hanya dikenakan pada "Dunia Ketiga", dikelola menurut *development administration* yang diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan. Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* (penyedia) jasa-jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan *civil* dan layanan birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai

provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri.

Sedangkan fungsi manajemen sendiri menurut pendapat Ricky W.Griffin terdapat macam-macam bentuk fungsi yang antara lain:

1. Fungsi Perencanaan

Dalam hal ini perencanaan didefinisikan sebagai tujuan dari organisasi yaitu untuk membuat strategi agar tercapainya suatu tujuan. Selain daripada itu juga berfungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sehingga bisa berjalan.

2. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi ini kaitannya dengan bagaimana strategi dan taktik yang telah direncanakan kemudian di desain dalam suatu bentuk struktur organisasi yang tepat juga tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif sehingga dapat dipastikan bahwa semua pihak dalam organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif guna tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri.

3. Fungsi Pengarahan dan Implementasi

Proses implementasi ini merupakan suatu bentuk program yang dapat dijalankan oleh seluruh pihak sehingga dalam proses organisasi dapat memotivasi agar semua pihak tersebut mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

Proses ini dimaksudkan untuk memastikan agar seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan mampu berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, meskipun berbagai perubahan memungkinkan terjadi dalam pengimplementasiannya.

Henry Fayol memiliki pendapat lain dalam hal fungsi manajemen antara lain yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan dan mengendalikan.

1. Perencanaan

Dapat diartikan sebagai proses agar mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan selain daripada itu juga merupakan suatu bentuk pengambilan langkah strategis demi mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian ini proses dalam pemberian perintah, pengalokasian sumber daya tertentu serta pengaturan kegiatan yang secara terkoordinir kepada setiap individu agar menerapkan rencana. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian mencakup tiga kegiatan yaitu (1) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok, (2) membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut, (3) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (motivation) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan.

4. Pengendalian

Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*). Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup empat kegiatan, yaitu (1) menentukan standar prestasi; (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini; (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi; dan (4) melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan fungsi manajemen lebih lanjutnya sendiri antara lain sebagai berikut :

1. *Planning* (perencanaan), menurut Usman merupakan proses pengambilan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pendapat yang sama dari Terry & Roe mengemukakan *planning* sebagai penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. *Planning* (perencanaan), berarti menentukan suatu cara bertindak yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.
2. *Organizing* (pengorganisasian), berarti memobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari organisasi untuk mewujudkan rencana menjadi suatu hasil.
3. *Motivating* (pemberian motivasi), pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan agar melakukan kegiatan secara suka rela sesuai dengan tugas-tugasnya.
4. *Controlling* (pengawasan), berarti pemantauan (*monitoring*) rencana untuk menjamin agar dikemudikan dengan tepat (Siswanto, 2009).

Segala macam uraian fungsi yang telah di jelaskan diatas tiada lain untuk mencapainya suatu sistem tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan. Tidak banyak suatu konsep ataupun teori yang memberikan penjelasan mengenai tata kelola. Namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tata kelola diartikan sebagai tata cara mengelola. Sedangkan 'tata' itusendiri memiliki arti sebagai aturan, kaidah, dan susunan. Dan 'cara' merupakan jaan aturan melakukan sesuatu, atau gaya, ragam, ata kebiasaan. Sehingga apabila secara bebas dan lengkap 'tata kelola' dapat di definisikan sebagai kaidah, aturan, susunan, atau sistem sebagai jalan yang harus ditempuh agar melakuukan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dengan usaha dan ikhtiar. Sehingga tata kelola ini memiliki kaitannya dengan manajemen dan organisasi. Sehingga ketika ingin memahami mengenai tata kelola berarti sma dengan mendalami konsep serta teori mengenai manajemen dan organisasi (Hamdi, 2021).

Disamping daripada pentingnya tata keolola dan fungsi, konsep akuntabilitas juga perlu diperhatikan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah, sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (Adisasmita, 2011).

Dalam administrasi publik pertanggungjawaban mengandung tiga konotasi berikut ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Sebagai Akuntabilitas

Akuntabilitas di sini berperan jika suatu lembaga (*agency*) harus bertanggungjawab atas kebijakan-kebijakan (*policies*) tertentu. Dengan demikian terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas eksplisit (*answerability*) dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggungjawaban seorang pejabat negara manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul konsekuensi atas caracaranya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sementara itu, akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur negara secara implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat-akibat keputusan yang dibuat.

2. Pertanggungjawaban Sebagai Sebab-Akibat (*Cause*)

Jenis pertanggungjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu lembaga diharuskan untuk mempertanggungjawabkan jalannya suatu urusan (*the conduct of some affairs*). Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu: sumber (*resource*), pengetahuan, pilihan dan maksud (*purpose*). Keempat unsur ini harus ada di dalam mempertanggungjawabkan urusan publik. Jika salah satu unsur hilang, maka pertanggungjawaban itu menjadi cacat. Sementara itu, pertanggungjawaban kausal implisit merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan, misalnya kebajikan (*virtue*) atau kesejahteraan (*welfare*) buat sesama.

3. Pertanggungjawaban Sebagai Kewajiban (*Obligation*)

Apabila seseorang bertanggungjawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu, itu berarti bahwa:

- a. Dia harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggung jawaban kausal kepada orang yang memberinya delegasi, dalam rangka menyempurnakan hal-hal yang dipertanggungjawabkan tersebut.
- b. Dia harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit.

Oleh karena itu, secara luas pertanggungjawaban mengandung arti yang bermacam-macam, tergantung dari aspek mana kita melihatnya. Pertanggungjawaban etis tentunya berbeda dengan pertanggungjawaban rasional. Jika pertanggungjawaban rasional dapat diangkat dari tindakantindakan nyata dan sanksi-sanksi yang diterapkan dapat dipaksakan oleh orang lain, sebaliknya pertanggungjawaban etis sifatnya lebih abstrak, dan sanksi-sanksi yang mengiringi hendak menyentuh langsung nurani manusia yang mewujudkan sikap, tindakan dan keputusan tertentu. Kecuali itu, pertanggungjawaban juga dapat dibedakan menurut jenjangnya.

Untuk menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik komunikasi organisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terkadang dalam prosesnya komunikasi ini dianggap hal yang sepele, namun apabila tidak diindahkan maka akan sulit menciptakan pengkoordinasian dalam menjalankan roda pemerintahan. Terjadinya berbagai permasalahan terhadap iklim komunikasi organisasi efektif dan efisien ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor tersebut bisa berupa faktor pendukung dan faktor penghambat, sehingga iklim komunikasi organisasi mudah diterapkan atau sulit diterapkan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pimpinan, tingkah laku SDM atau karyawan, kelompok kerja dan eksternal organisasi (Purnomo, 2018). Selain daripada itu komitmen dalam organisasi juga perlu di implementasikan, yang mana kaitannya dengan keyakinan

keberterimaan, keinginan bekerjasama serta upaya untuk tetap berada dalam organisasi (Komalasari et al., 2009).

KESIMPULAN

Faktor penting dalam manajemen adalah bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan, bagaimana kita menyeimbangkan tujuan-tujuan yang sekiranya bertentangan, dengan manajemen pula, bagaimana kita membuat pekerjaan menjadi efektif dan tentunya efisien. Secara umumnya fungsi dari sistem organisasi pemerintahan mencakup beberapa hal yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Seni manajemen menuntut adanya kreativitas yang didasarkan pada kondisi pemahaman ilmu manajemen. Dengan demikian, ilmu dan seni manajemen saling mengisi. Jika salah satu meningkat, maka yang lain juga harus meningkat, dibutuhkan suatu keseimbangan diantara kedua aspek tersebut. Untuk mencapai segala bentuk yang dicita-citakan dalam terselenggaranya pemerintahan, manajemen pemerintah adalah faktor utama, termasuk didalamnya organisasi dan sumber daya yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Astomo, P., Akhmaddhian, S., Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 09(1), 30–38. <http://www.nber.org/papers/w16019%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/2198/1604>
- Goraph. (2020). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Cv Pilar Nusantara.
- Hamdi, M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa (1 ed.)*. Sinar Grafika Offset.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Garis Khatulistiwa.
- Holik, Abd. (2014). Good Governance dalam Membangun Masa Depan Indonesia. *Tafaquh*, 2(1), 108-145.
- Horner, M. 1997. Leadership Theory: Past, Present and Future. *Team Performance Management*, 3(4), 270-287
- Indrawati. (2012). PRINSIP GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNANCE. *Perspektif*, 17(3), 201-211. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.109>
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Komalasari, P. T. T., Nasih, M., & Prasetyo, T. (2009). Pengaruh Public Service Motivation Dan Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v2i2.2380>
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 11. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.111>

- Rifai, A., Maarif, M. S., & Sukmawati, A. (2021). Persepsi Pegawai Terhadap Implementasi Manajemen Talenta Di Organisasi Pemerintahan. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 7(2), 366–378. <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.366>
- Siregar, T. R. (2020). *Manajemen Pemerintahan (1 ed.)*. Ideas Publishing.
- Siswanto. (2009). *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Sukanto, S.H., M.A, Prof. Dr. Soerjono, Mamudji, S.H;M.L.L, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (17 ed.)*. Rajawali Pers.
- Syarifin, P. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Pustaka Bani Quraisy.
- Taryono, Anggraeni, R. R. D., Yunus, N. R., Rezki, A. (2021). Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 649-662. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20253>
- Terry. (2009). *Guide To Management (terjemahan)*. Bumi Aksara.